

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA
MURA KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2019**

*The Effectiveness Of The Badan Permusyawaratan Desa (BPD) In Monitoring
The Implementation Of Village Development In The Village Of Mura, Brang
Ene District, West Sumbawa In 2019*

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH
INDAH LASTRI RAMDAYANTI
NIM.217110119

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MURA KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019

Oleh:

INDAH LASTRI RAMDAYANTI

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal 15 Februari 2021

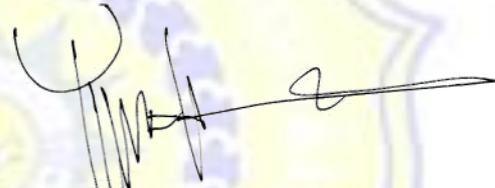
Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Abdurrahman, MM
NIDN.0804116101



Yudhi Lestanata, S. IP.M. IP
NIDN.0827118801

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MURA KECEMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019

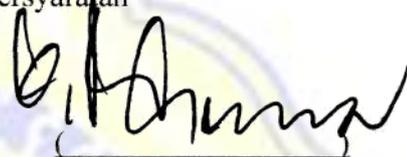
Oleh:

INDAH LASTRI RAMDAYANTI
NIM. 217110119

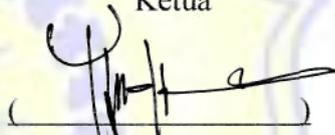
Telah dipertahankan didepan peguji
Pada tanggal 15 Februari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Dr. H. Abdurrahman, MM**
NIDN. 0804116101

()
Ketua

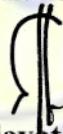
2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**
NIDN. 0827118801

()
Anggota

3. **Dedy Iswanto, ST., MM**
NIDN. 0818087901

()
Anggota

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik

()
Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN: 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

()
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

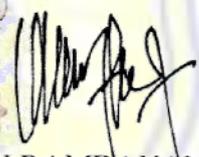
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 15 Februari 2021

Mahasiswa,

METERAI
TEMPEL
48E60AHF839828029

6000
ENAM RIBU RUPIAH


INDAH LASTRI RAMDAYANTI

217110119



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Lastri Raudayanti
NIM : 217110119
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 27 Desember 1995
Program Studi : Adm. publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 082 241 245 096
Judul Penelitian : -

EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGAWASAN PELAKSIANAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA
MURA KEC. BRANG ENI KAB. SUMBAWA BARAT TAHUN 2019

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 99,47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 - 02 - 2020

Penulis



Indah Lastri - f.
NIM 217110119

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upi.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Lastri Ramdayanti
NIM : 217110119
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar 22 Desember 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 082 39 245 046
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul

"Efektivitas Badan Perencanaan Desa (BPD) Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Di Desa Mura Kecamatan Berau Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019"

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Februari 2021

Penulis

METERAI
TEMPEL

E23CFAHF933401937

6000
ENAM RIBU RUPIAH

INDAH LASTRI . R.

NIM 217110119

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu.”

“Hari ini Harus lebih baik dari Hari Kemarin dan hari Esok adalah Harapan.”

(Indah Latri Ramdayanti (Cumben/Penulis)

PERSEMBAHAN :

1. Sujud syukur ku persembahkan pada **ALLAH** yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang.
2. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Mulyadi dan Ibu Saya Nurkabah yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta member dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
3. Kakak-kakak ku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi lebih bagiku.
4. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi semangat dan dukungan Indah Januarti, Isti Mutmainah, Ine Nidia Pratiwi terimah kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Dan Terimakasih juga kepada teman seperjuanganku teman kelas-kelasku terimahsih atas canda tawa kalian yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama.

Terima Kasih Uuntuk Kalian Semua

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Abdurrahman, M.M Selaku Dosen Pembimbing I di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Yudhi Lastanata, S.IP., M.IP Selaku Dosen Pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Kedua Orang Tua Tercinta saya Ayah Mulyadi dan Ibu saya Nurkabah yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Saudara saya Rio Rizki Nuryadin.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2017.

Mataram, 15 Februari 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Efektivitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Mura Kec. Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, termasuk dalam penulisan skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-kata yang kurang dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram, 15 Februari 2021

Indah Lastri Ramdayanti
NIM. 217110119

**EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA
MURA KECEMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2019**

Indah Lastri Ramdayanti¹, Drs. H. Abdurahman, MM², Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP³
Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat bertujuan Untuk mengetahui Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Mura Kec. Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ketepatan waktu dimana pemerintah desa dan BPD sebelum dilaksanakannya program atau proyek desa maka mereka membuat rancangan awal terlebih dahulu terutama dalam menentukan waktu atau target pengerjaan selama proyek dijalankan. (2) Ketepatan dalam menentukan tujuan program dalam menentukan tujuan program pihak melakukan musyawarah desa terlebih dahulu bersama masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada BPD dan BPD menyalurkan Aspirasi mereka kepada Kepala Desa agar menindaklanjuti aspirasi mereka. (3) Ketepatan sasaran maka pihak pemerintah desa mengelola aspirasi masyarakat dengan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan cara melakukan musyawarah bersama BPD agar pemerintah tau apa saja yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa. (4) Ketepatan hasil pihak pemerintah desa Mura dan BPD telah menjalankan pembangunan desa tahun 2019 yaitu pembuatan Bronjong, pembuatan drainase masjid dan pembuatan jalan baru.

Kata kunci: Efektivitas, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa

**THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN
SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE
DEVELOPMENT IN MURA VILLAGE, BRANG ENE DISTRICT, WEST
SUMBAWA REGENCY, 2019**

**Indah Lastri Ramdayanti¹, Drs. H. Abdurahman, MM², Yudhi Lestanata,
S.IP.,M.IP³**

Student¹, Main Advisor², Co-Advisor³

**Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah Mataram University**

ABSTRACT

This research was conducted in Mura Village, West Sumbawa Regency, Brang Ene District. The objective of this study is to determine the effectiveness of the Village Consultative Body (BPD) Supervision in the supervision of Village Development Implementation in Mura Village, Brang Ene districts, West Sumbawa Regency in 2019. In this study, the type of research used qualitative descriptive analysis. Observation, interviews, and documentation were data collection methods. The data analysis used was data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study's results indicate that (1) the accuracy of the timing in which the village government and BPD before implementing the village program or project make the initial design, especially in determining the time or work target during the project. (2) Accuracy in determining program objectives, parties conduct village deliberations with the community to voice their BPD aspirations. BPD channel their aspirations to the Village Head to follow up on their aspirations. (3) Accuracy of targeting means that the village government manages the community's aspirations according to the community's needs by conducting deliberations with the BPD so that the government knows what is most needed by the community in village development. (4) The accuracy of the Mura village government results and the BPD has carried out village development in 2019, namely the construction of Bronjong, construction of mosque drainage, and new roads.

Keywords: Effectiveness, Village Consultative Body, Village Development Implementation Supervision



KEPALA
URUSAN

[Handwritten signature]

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISONALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Teori.....	14

2.2.1	Konsep Efektivitas	14
2.2.2	Konsep Pengawasan.....	22
2.2.3	Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	31
2.2.4	Pembangunan	36
2.3	Kerangka Berfikir	44
2.4	Definisi Konseptional.....	46
BAB III METODELOGI PENELITIAN		47
3.1	Jenis Penelitian.....	47
3.2	Lokasi Penelitian.....	47
3.3	Fokus Penelitian.....	48
3.4	Tehnik Penentuan Informan.....	48
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	49
3.6	Tehnik Pengumpulan Data.....	49
3.7	Metode Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Deskripsi Hasil Penelitian	54
4.2	Pembahasan.....	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan	55
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Mura Tahun 2019	57
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mura Tahun 2019.....	58
Tabel 4.4 Mata Pencarian Pokok	59
Tabel 4.5 Program yang dilakukan tahun 2019 Desa Mura Kecamatan Brang Ene.....	64
Tabel 4.6 Lokasi Ketepatan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	68
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Desa Mura.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Penelitian.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat	60
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Lembar Konsultasi Skripsi
3. Berita Acara
4. Surat Mohon Izin Penelitian.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di Ibu Kota Semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita Negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa. Keberadaan desa juga menentukan pencapaian pemerintah dalam hal pembangunan yaitu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara (Lorosa, 2017: 26)

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia khususnya masyarakat dipedesaan tentu direalisasikan melalui beberapa kebijakan ataupun program yang dalam pelaksanaannya sudah terlihat sejak adanya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk strategi pembangunan desa. strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan di tempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan desa dirasa masih kurang optimal sehingga masih banyak desa dengan kategori tertinggal.

Pembangunan adalah aspek paling penting dalam suatu Negara yang pada hakikatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demikian

halnya Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat dan seluruhnya. Kesejahteraan ini akan dapat dicapai dengan mengurangi jumlah angka kemiskinan dan pengangguran (dalam Mardhiah, 2018: 78).

Realisasi tujuan dan sasaran pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. (dalam Mardhiah, 2018: 78)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Penataan Desa, Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, Tata cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa, dan Pembangunan Pengawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan

Lembaga Adat Desa dan Pembinaan dan Pengawasan Oleh Camat atau sebutan lainnya (PP No 43 Tahun 2014). (dalam Mardiah, 2018: 78)

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 dijelaskan Bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Telah dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. (dalam Mardhia, 2018: 79).

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri. seiring dengan perkembangan daerah, pemerintah pusat telah memberikan tugas pembantu kepada pemerintah desa untuk selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat melalui otonom pemerintahan desa serta peran aktif partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. (dalam Mardhiah, 2018: 78).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan Undang-Undang Desa Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55, BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Setelah BPD dibentuk di Desa Mura Kec. Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat pada periode sekarang ini, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunannya diperlukan kebijakan pemerintah Desa dan peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Peran BPD selanjutnya dapat dilihat dari proses pengawasan dan tindak lanjutnya.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu mewujudkan menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses.

Untuk tercapainya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang terpenting bagi pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kepala desa / Lurah sebagai koordinator dan administrator pemerintahan Desa. Selain itu untuk dapat terwujudnya pembangunan desa diperlukan adanya kemampuan Lurah dalam bekerja sama dengan perangkat Kelurahan dan masyarakat melalui lembaga-lembaga desa di bidang pemerintahan dengan baik, yang sebagian besar bersifat pembangunan fisik.

Berdasarkan pengamatan awal dari informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mura Kec. Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD belum berjalan secara maksimal berdasarkan tugas dan fungsi di dalam Undang-undang.
2. Masih lemahnya pelaksanaan fungsi BPD itu sendiri seperti menggali,

mengelolah dan menampung aspirasi masyarakat.

Berdasarkan ”*Research Gap*” dari penelitian-penelitian terdahulu bahwa dalam penelitian:

- a. Dalam penelitian Umi kalsum Siregar (2018) dengan judul penelitian “Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bakaran Batu Kec. Batang Kuis kab. Deli Serdang” yang dimana di dalam penelitian tersebut Efektivitas kinerja BPD dalam pembangunan infrastruktur di desa tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan itu berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
- b. Dalam penelitian Ependi Pasaribu (2019) dengan judul “Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Raja Kec. NA IX-X Aek Kota Batu Kab. Labuhan Batu Utara)” menyebutkan bahwa BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasibelum berjalan secara efektif dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya keterlibatan masyarakatan itu sendiri.
- c. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh Alamsri (2014) dengan judul ”Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Ponggok kec. Polanharjo kab. Kalten)” yang menyatakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang dirasakan oleh masyarakat disebabkan karena

kurangnya partisipasi aktif masyarakat pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan indikasi bahwa Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa masih perlu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek. Dari masalah tersebut penulis tertarik membahas masalah yang akan diteliti terkait dengan judul: **“Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ”Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan Desa sudah berjalan dengan baik di Desa Mura Kec. Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni: Untuk mengetahui Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Mura Kec. Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Rencana penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan sistem pendidikan serta menambah wawasan dan

kemampuan berpikir pada perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara peraktis rencana penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi peneliti

Rencana penelitian ini selain menamba wawasan bagi peneliti juga Sebagai bahan pembelajaran guna untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam pembangunan Desa.

2. Bagi pemerintah

Rencana penelitian ini diharapkan berguna Sebagai bahan informasi baru bagi pembangunan desa di desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Bagi masyarakat

Rencana penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Mura dalam upaya pelaksanaan pembangunan Desa khususnya di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Bagi akademisi

Rencana penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman pembelajaran serta sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Umi Kalsum Siregar (2018) Dengan Judul Penelitian “Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian secara umum bahwa fungsi yang dilakukan oleh BPD Bakaran Batu masih sangat kurang maksimal dan bahkan dapat dikatakan tidak berpengaruh apa-apa dalam pemerintahan dan pembangunan, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pasifnya anggota BPD dan kurang meratanya pembangunan infrastruktur desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Trieputra I.S Poli (2018) Dengan judul penelitian “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kanonang Satu

Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.” Hasil Penelitian secara umum bahwa BPD Desa Kanonang Satu telah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pembangunan infrastruktur Desa Kanonanga Satu, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur Desa Kanonang dapat berjalan dengan baik mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan BPD. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kanonang Satu berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan pemerintah desa memberikan ruang bagi BPD untuk mengawasi jalannya proses pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Satu dan BPD bekerja sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Ependi Pasaribu (2019) Dengan judul “Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhanbatu Utara)”. Hasil penelitian secara umum yaitu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara, hat ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterlibatan dan kemampuannya dalam sistem pemerintahan, dan faktor kesejahteraan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Almasri (2014) Dengan judul “Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan

Pedesaan “(Studi Kasus Di Desa Pongkok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)” Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Seperti yang kita ketahui, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemiskinan dan keterletarbelakangan padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1	Nama	Umi Kalsum Siregar (2018)
	Judul Penelitian	Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
	Metode Penelitian	Metode Deskriptif Kualitatif
	Hasil Penelitian	Dalam penelitian ini yang telah dilakukan bahwa fungsi yang dilakukan oleh BPD Bakara Batu masih sangat kurang maksimal dan bahkan dapat dikatakan tidak berpengaruh apa-apa dalam pemerintahan dan pembangunan itu terlihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pasifnya anggota BPD dan kurang meratanya pembangunan infrastruktur desa.
	Relevansi	Kesamaannya dengan yang dikaji peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Pembangunan, dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Namun perbedaannya pada penelitian terdahulu dan peneliti terletak pada pembangunan infrastruktur desa sedangkan penelitian ini adalah pembangunan dalam pengawasan pembangunan desa.
	Critical Point	Sejauh ini penelitian yang di lakukan sudah di

		lakukan dengan baik, yang harus di perkuat lagi data-data yang dapat menunjang penelitian tersebut.
2	Nama	Trieputra I.S Poli (2018)
	Judul	Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa
	Metode Penelitian	Metode Kualitatif
	Hasil Penelitian	Pembangunan infrastruktur Desa Kanonang Satu dapat berjalan dengan baik mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan BPD. Pengawasan yang di lakukan oleh BPD Desa Kanonang Satu berjalan dengan efektif, hal ini di karenakan pemerintah desa memberikan ruang bagi BPD untuk mengawasi jalan proses pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Satu dan BPD bekerja sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tidak di temukan kendala.
	Relevansi	Kesamaannya dengan yang dikaji peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan, dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Namun perbedaannya adalah hanya lokasi penelitian serta teori yang digunakan.
	Critical Point	Sejauh ini penelitian yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, hanya perlu menambahkan teori-teori untuk memperkuat data peneliti.
3	Nama	Ependi Pasaribu (2019)
	Judul Penelitian	Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhan Batu Utara).
	Metode Penelitian	Metode Penelitian Empiris (Kualitatif)
	Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian yaitu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan dengan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Di Desa

		Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhan Batu Utara, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya ketrlibatan dan kemampuannya dalam sistem pemerintahan, faktor kesejahteraan.
	Relevansi	Penelitian yang di kaji oleh penulis dengan penelitian yang terkait sama-sama mengkaji Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Namun yang menjadi perbedaannya yaitu terletak di teori yang digunakan.
	Critical Point	Kurangnya data-data sebagai alat untuk memperkuat penulisan dalam penelitian ini.
4	Nama	Alamasri (2014)
	Judul Penelitian	Peran program pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan (studi kasus di desa pongok kecamatan polaharjo kabupaten kalaten.
	Metode Penelitian	Metode Kualitatif
	Hasil Penelitian	Seperti yang kita ketahui, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat di rumuskan dalam satu kalimat yaitu “Berikan peluang pada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.
	Relevansi	Penelitian yang dikaji oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis dimana dalam hal ini sama-sama membahas tentang pembangunan pedesaan. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian.
	Critical Point	Dalam penulisan jurnal ini tidak dicantumkan kajian teori atau telaah teorinya untuk menggambarkan konsep dan teori maupun hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Konsep Efektivitas

2.2.1.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian dalam keberhasilan mencapai tujuan, dimana efektivitas mengandung pengertian berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Dalam suatu organisasi, pencapaian hasil yang besar diartikan semakin besar pula efektivitas dari tujuan yang diharapkan oleh organisasi. (dalam Rahmawati, 2017:111)

Secara terminologis, efektivitas berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna, atau dengan kata lain dapat juga dipahami sebagai tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan, dimana hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (dalam Hartati, 2018:115)

Menurut F. Drucker dalam Scoderbeg (Sugiyono, 2003:16) dalam Aziz, 2016:41) menyatakan bahwa "*Effectiveness is the foundation of success and effectiveness is doing the right things*", yang dimana artinya bahwa efektivitas merupakan landasan untuk mencapai kesuksesan dan dengan pekerjaan yang memang betul dikerjakan.

Adapun pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005:109) dalam Rahmawati, 2017:112) dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan suatu

kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi (operasi kegiatan program atau misi) pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Hal tersebut menekankan bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada kemampuan organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dimana dalam proses pelaksanaannya tanpa tekanan yang berasal dari anggota organisasi.

Menurut M. Syarif dan S.M. Richard (dalam Amaral, 2019:115) bahwa dimana setiap bentukan organisasi pasti memiliki sebuah tujuan, dalam hal pencapaian tujuan tentu ada yang tercapai, lambat, cepat atau malah tidak mencapai tujuan yang diharapkan, oleh sebab itu penilaian atas usaha pencapaian tujuan merupakan penilaian efektivitas.

2.2.1.2 Konsep Efektivitas

Menurut Gibson (dalam Aziz, 2016:41) mengemukakan 2 pendekatan konsep efektivitas, yaitu :

1. Pendekatan Tujuan, yang didasarkan pada gagasan bahwa organisasi adalah kesatuan yang rasional dan mempunyai tujuan yang mengandung misi, tujuan dan sasaran yang khas. Oleh karena itu, seberapa baik organisasi tersebut berfungsi, atau seberapa efektif organisasi tersebut dihitung dengan ukuran bagaimana keberhasilannya untuk mencapai tujuannya.
2. Pendekatan Sistem, yang memandang bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang kehadirannya merupakan bagian dari suatu

lingkungan yang lebih luas dan agar terus hidup organisasi tersebut harus berfungsi memuaskan dari lingkungannya.

Disisi lain adapun konsep efektivitas menurut Sinungan (2000:14) dalam Aziz, 2016:41) yaitu :

1. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara teori organisasi modern maupun klasik tentang output dan input.
2. Efektivitas dianggap sebagai perbandingan antara tingkatannya, dimana sasaran yang dikemukakan dapat dianggap tercapai.
3. Efektivitas eksternal atau perbandingan antara suatu unit output dan evaluasi satu unit input.
4. Efektivitas adalah kemampuan sistem yang tetap berlangsung, beradaptasi dan berkembang tanpa memperdulikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai.

2.2.1.3 Kriteria Efektivitas

Menurut Gibson (dalam Aziz, 2016:198) terdapat kriteria dari efektivitas, yaitu :

1. Kriteria Produksi, kriteria ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan keluaran kualitas yang dibutuhkan lingkungan.
2. Kriteria Efisiensi, dimana kriteria ini melakukan perbandingan keluaran terhadap masukan yang mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka dalam organisasi.

3. Kriteria Kepuasan, kriteria ini mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.
4. Kriteria Keadaptasian, yaitu kriteria ketanggapan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Kriteria Pengembangan, dimana kriteria ini untuk mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya terhadap lingkungan.

2.2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Selain itu terdapat 4 (empat) kategori yang mempengaruhi efektivitas menurut Steers (dalam Aziz, 2016:198) yakni :

1. Sifat Organisasi, terdiri dari struktur organisasi dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, yang merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor-faktor seperti desentralisasi pengendalian. Sedangkan teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
2. Sifat Lingkungan, sifat ini mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi, yang meliputi macam-macam atribut lingkungan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi seperti kondisi ekonomi.

3. Sifat Karyawan, yang berhubungan dengan peranan dan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi perbedaan sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap efektivitas organisasi.
4. Kebijakan dan Praktek Manajerial, karena manejer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan mempelancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut haruslah jelas yang membawa kita ke arah tujuan yang diinginkan. Dari faktor kebijakan dan praktek manejrial ini, sedikitnya diidentifikasi menjadi enam aspek yang menyumbang efektivitas yaitu: (a) penyusunan tujuan strategis, (b) pencarian dan pemanfaatan sumber daya, (c) menciptakan lingkungan prestasi, (d) proses komunikasi, (e) kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan (f) inovasi dan adaptasi.

2.2.1.5 Aspek-Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat (Muasaroh, 2010:13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain :

- 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu Lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.
- 4) Aspek tujuan atau kondidi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

2.2.1.6 Variabel Efektivitas

Menurut Budiani (2007:53) terdapat empat vaiabel untuk melihat efektivitas suatu program, yaitu :

1. Ketepatan Sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu dimana kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2.2.1.7 Indikator Efektivitas

Adapun indikator dari efektivitas menurut Makmur (2011:7-9) dalam Mingkid, 2017:3-4), yaitu :

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan biaya merupakan bagian dari efektivitas.

3. Ketepatan Dalam Pengukuran

Dengan ketepatan dalam pengukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran dari efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga nantinya dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur.

5. Ketepatan Berfikir

Ketepatan berfikir dapat melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dan dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.

7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat dapat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu

kurang teat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Menurut Champhehl J.P. (dalam Lestana, 2016:373) adapun pengukuran efektivitas secara umum dan menonjol, yaitu :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Tingkat Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh.

2.2.2 Konsep Pengawasan

2.2.2.1 Definisi Pengawasan

Menurut Brantas (2009) Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tujuan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Menurut Strong dalam buku Brantas (2009) pengawasan adalah proses dalam pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Menurut GR Terry dalam buku Brantas (2009) pengawasan adalah sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan 14 perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Siagian (2003) pengawasan adalah segenap kegiatan

untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian (2003) ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung :

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung dan observasi ditempat, agar dapat dihindari kebocoran dan penyimpangan dalam bekerja dan akan berjalan efektif serta bisa menghasilkan efektifitas kerja yang baik
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.

Menurut Sofyan (2004) pengawasan adalah mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Kartini Kartono (2002) memberikan pengertian bahwa pengawasan umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasar dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan 15 dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap

penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Kartini Kartono (2002) juga menyatakan bahwa untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menajalin jaringan komunikasi yang baik, sember pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.

2.2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Menurut T. Hani Handoko (1998) faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Perubahan Lingkungan Organisasi Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tentang atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. Peningkatan Kompleksitas Organisasi Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara tepat.

- c. Kesalahan-Kesalahan Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis.
- d. Kebutuhan Manajer untuk mendelegasikan wewenang Bilamana menejer mendelegaikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

2.2.2.3 Tipe-Tipe Pengawasan

Dapat dilihat dari tiga tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, adalah :

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Yaitu Pengawasan yang direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu rencana tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Yaitu Pengawasan yang dilakukan selama masih dalam kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yang dimana pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.

Menurut Handyaningrat Pengawasan merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Maka dilihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2.2.2.4 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Handyaningrat menjelaskan bahwa Maksud dan Tujuan Pengawasan yaitu :

- a. Untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diperoleh sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

2.2.2.5 Mekanisme dan Prosedur Pengawasan

Mekanisme merupakan pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja untuk menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Mekanisme yaitu teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atau prinsip kerja. Sedangkan Prosedur merupakan urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di

mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri. Begitu juga bahwa kita sadari dan membenarkannya bahwa pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan. Disamping itu juga bahwa kita sadari pula bahwa dimana kegiatan dalam pengawasan terdiri atas berbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan.

2.2.2.6 Jenis-Jenis Pengawasan

- a. Pengawasan fungsional. Yaitu Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang memiliki pemahaman terhadap pengawasan fungsional. Sebenarnya telah melekat kepada lembaga

dimana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

- b. Pengawasan masyarakat. Yaitu Penyelenggaraan pengawasan masyarakat yang ditunjukan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya Negara yaitu penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
- c. Pengawasan Administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik adalah agar pendataan dari pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, agar terciptanya kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan dalam pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.
- d. Pengawasan teknis. bertujuan Untuk memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal agar terpenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.
- e. Pengawasan pimpinan. Didalam Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya: yang pertama yaitu unsur sebagai

pemimpin dan kedua sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin bertugas untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.

- f. Pengawasan barang, pengawasan barang merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa. Yang dimaksud adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya juga jika tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.
- h. Pengawasan internal. Kelembagaan Negara yang memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan

semacamnya Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik supaya tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

- i. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar sub kelembagaan tertentu, seperti negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan Negara yaitu Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

Sedangkan menurut Masimamgun jenis-jenis pengawasan dapat dilihat dari 2 segi :

- a. Pengawasan dari segi waktu

Pengawasan dari segi waktu ini dapat dilakukan secara preventif dan secara representif. Alat yang dipakai dalam pengawasan yaitu perencanaan budget, sedangkan pengawasan secara repensif yaitu alat budget dan laporan. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.”

b. Pengawasan dilihat dari segi obyektif.

Pengawasan dari segi obyektif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap produksi dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan karyawan dari segi obyek merupakan pengawasan secara administratif dan pengawasan operatif. Contohnya yaitu pengawasan anggaran, inspeksi, pengawasan order dan pengawasan kebijaksanaan. Pengawasan dari segi subyek. Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka yang dimaksud dalam pengawasan pada penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi itu tercapai.

2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.2.3.1 Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Berubahan ini didasarkan karena ada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui, musyawarah untuk mufakat berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam pemerintahan desa BPD dapat dianggap sebagai “parlemen-nya” desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesahan peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan pemerintah desa merupakan mitra yang berkerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa dalam Undang-Undang Tentang Desa Pasal 55. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang bersal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari

masyarakat. Dalam melaksanakan perannya sebagai sarana yang melancarkan keputusan kolektif di desa maka BPD yang merupakan wakil dari masyarakat desa tersebut, harus menjembatani antara masyarakat dengan pemerintahan desa minimal dengan adanya kesamaan pendapat dalam menentukan keputusan-keputusan kolektif di desa dan apabila tidak dijembatani maka setidaknya BPD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa agar nantinya setiap keputusan-keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi anatara lain (Wasistiono, 2006:36):

- a. Adanya kedudukan sejajar diantara yang bermitra.
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
- c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.
- d. Adanya prinsip saling menghormati.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Kemudian dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 menyebutkan bahwa tugas BPD adalah sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan Hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari Pasal 55 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

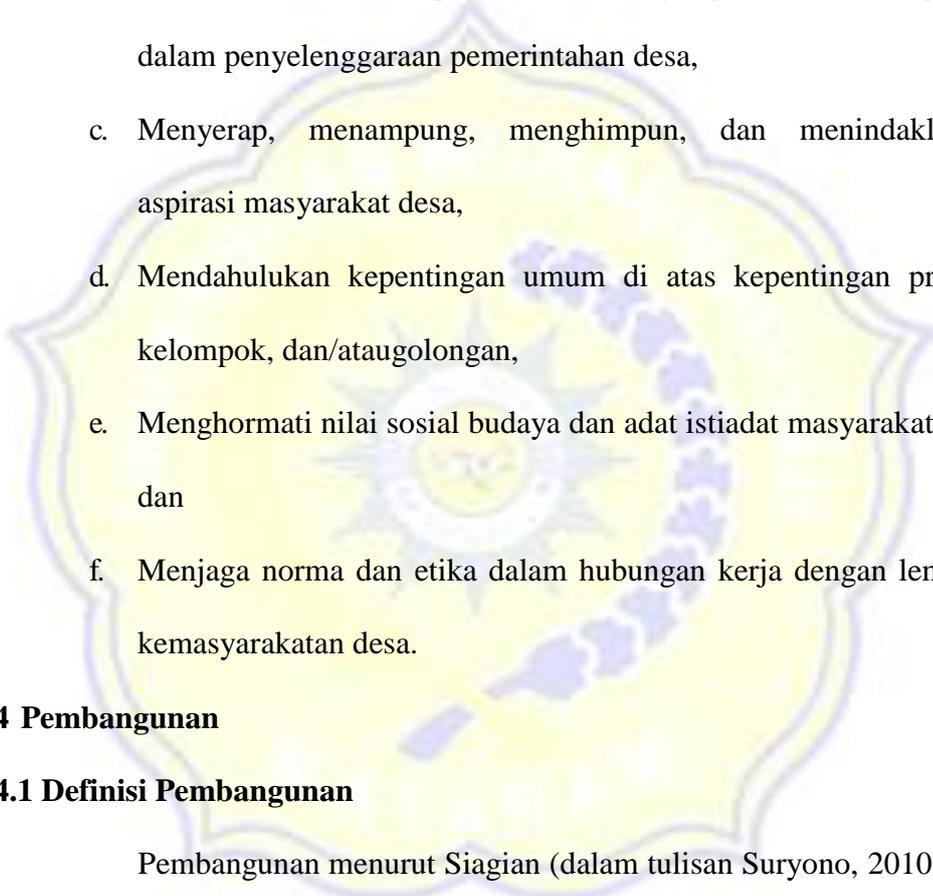
3. Hak dan Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari Pasal 61 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari Pasal 63 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan desa berkewajiban :

- 
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa,
 - d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ataugolongan,
 - e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
 - f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

2.2.4 Pembangunan

2.2.4.1 Definisi Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (dalam tulisan Suryono, 2010:2:46) sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, Negara dan Pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Dengan demikian ide pokok pembangunan tersebut mengandung makna: (1) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir, (2)

pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar yang dilaksanakan secara terus menerus, (3) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencnaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, (4) pembangunan mengarah kepada modernitas, (5) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Adapun menurut Katz (dalam Suryono, 2010:3) pembangunan merupakan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Apa yang dipandang lebih bernilai maka ialah sifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya yang satu ke budaya yang lain, atau dari negara yang satu ke negara yang lain.

Menurut Rogers (dalam Suryono, 2010:3) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain).

Pembangunan menurut Bryant dan White (dalam Suryono, 2010:2) mengemukakan bahwa pembangunan ialah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan

memiliki 5 (lima) implikasi utama yaitu: (1) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok, (2) pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan, (3) pembangunan berarti menaruh kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan, (4) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri, (5) pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara satu kepada Negara lainnya.

2.2.4.2 Unsur-Unsur Pembangunan

Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam pembangunan (dalam Suryono, 2010:4) yaitu :

1. Perubahan, yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang untuk menuju kesempurnaan.
2. Tujuan, yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh dan untuk rakyat menuju pelestarian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang lebih baik.
3. Potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

2.2.4.3 Tipe-Tipe Pembangunan

Menurut Tjokrowinoto (dalam Suryono, 2010:47-48) bahwa

terdapat 9 (sembilan) tipe pembangunan, yaitu:

1. Tipe Ideal (*ideal type*), dimana tipe ini dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem.
2. Tipe menghasilkan dalam jangka pendek (*short run pay of*), dimana tipe ini dengan ciri perencanaan yang mampu mengebalkan pertumbuhan, tetapi tidak dalam perubahan sistem.
3. Tipe menghasilkan dalam jangka panjang (*long run pay of*), dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan perubahan sistem, tetapi tidak dalam pertumbuhan.
4. Tipe kegagalan (*failure*), dengan ciri adanya perencanaan, tetapi tidak mampu mengendalikan baik pertumbuhan maupun perubahan sistem.
5. Tipe dorongan lingkungan (*environmental stimulus*), dengan ciri yang lebih mengutamakan perubahan sistem dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan.
6. Tipe Pragmatis (*pragmatisme*), dengan ciri lebih mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan.
7. Tipe Krisis (*crisis*), dimana tipe dengan ciri yang lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem.
8. Tipe masyarakat statis (*static society*), dengan ciri yang mengabaikan pentingnya semua aspek perencanaan, pertumbuhan maupun perubahan sistem.

9. Tipe Chaos, ditandai dengan fenomena masyarakat yang kebingungan, percecokan, kemarahan, banyak halangan dan jalan ditempat.

2.2.4.4 Konsep Pembangunan

Tinjauan terhadap konsep pembangunan dapat dikaji dari dua aspek penting (dalam Suryono, 2010:53-) yakni :

1. Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, yang diberi awalan pem dan akhiran an, guna menunjukkan perihwal pembangunan. Kata bangun stidak-tidaknya mengandung 4 arti : (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam yang arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina (gabungan aspek fisiologis, aspek perilaku dan aspek bentuk).
2. Secara Ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep :
 - a. Konsep Pertumbuhan (*growth*), adala konsep ekonomi, lengkap ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan berarti kenaikan pendaptan Nasional nyata jangka panjang waktu tertentu. Rostow dalam *The Stages Of Economic Growth* membentangkan teorinya yang terkenal tentang berbagai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yaitu Tahap masyarakat tradisional, Tahap transisional, Tahap

tinggal landas dan Tahap pematapan (pedewasaan) serta Tahap konsumsi masa tinggi.

- b. Konsep Rekonstruksi Ekonomi, adalah upaya pada peningkatan secara luas, melainkan yang lebih dititik beratkan pada upaya membangun kembali perekonomian suatu negara.
- c. Konsep Modernisasi, adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industry di Inggris.
- d. Konsep Westernisasi, adalah analog modernisasi, dimana hal ini adalah sebagai upaya pembangunan untuk menandingi Barat atau minimal mencapai taraf hidup yang relatif sama dengan yang terdapat didunia Barat.
- e. Konsep Perubahan Sosial, dimana diartikan sebagai perubahan kelembagaan masyarakat, yaitu perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai sosial, dan perilaku kelompok.
- f. Konsep Pembebasan, yang mengajarkan bahwa pembangunan bermakna sebagai proses penilaian kembali terhadap keadaan setiap kelompok masyarakat dan mengadakan perbaikan baik secara kelompok maupun individu.
- g. Konsep Pembaruan, merupakan salah satu diantara bentuk proses sosial yang erat berkaitan dengan modernisasi dan perubahan soail.
- h. Konsep Pembangunan Bangsa, merupakan salah satu dari konsep pembangunan multi dimensional sebagai bentuk perubahan sosial yang tidak hanya menyangkut pembangunan bangsa saja, tetapi

juga pembangunan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan pertahanan serta hubungan antar bangsa.

- i. Konsep Pembangunan Nasional, konsep ini merupakan dimana tekad untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan lainnya atau setidaknya tekad untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional diatas kepentingan lainnya.
- j. Konsep Pengembangan, sering dikaitkan dengan istilah negara yang sedang berkembang. Berdasarkan pendekatan antropologis negara ini dianalogkan dengan kondisi masyarakat primitive yang kemudian diubah menjadi masyarakat sederhana.
- k. Konsep Pembinaan, merupakan proses pembongkaran pola pikir lama yang dianggap keliru, yang selama itu mengendalikan diri bagi yang bersangkutan. Upaya ini dapat disebut semacam cuci gudang intelektual.
- l. Konsep Pembangunan, dianggap sebagai perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat.
- m. Konsep Pembangunan Nasional Indonesia, sebagai model analisis menunjukkan bahwa pembangunan Nasional Indonesia merupakan amanat konstitusi Undang-undang Dasar dan GBHN yang didalamnya tertuang tentang cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. Dengan demikian secara metodologis aspek-aspek penting yang tersurat dan tersirat dalam pembangunan nasional Indonesia setidaknya memiliki ideologi pembangunan (Pancasila), hakekat pembangunan (Pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia) dan strategi pembangunan (Trilogi pembangunan: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial).

2.2.4.5 Indikator Pembangunan

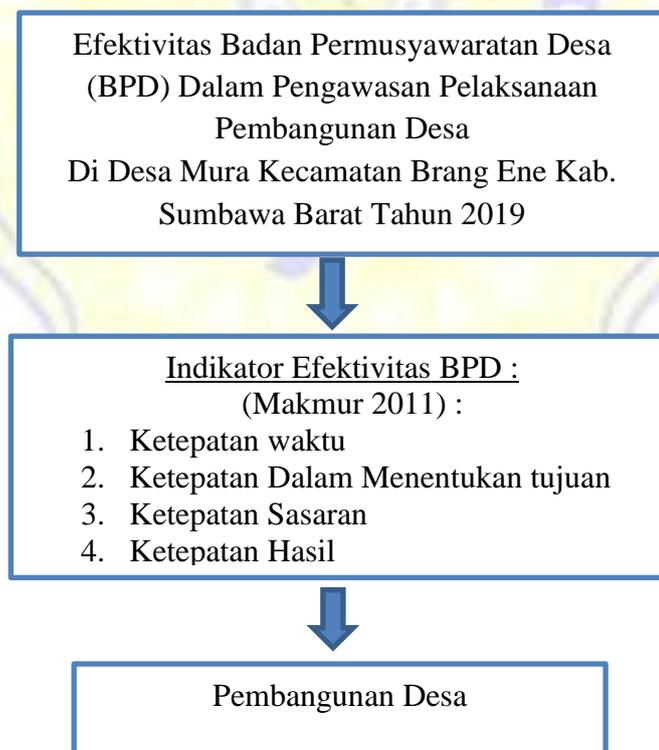
Menurut Arif Budiman (dalam Yudhi, 2016:374-375) ada 4 cara mengukur pembangunan, yaitu:

1. Kekayaan Rata-rata, pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Dimana sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara-negara tersebut setiap tahunnya.
2. Pemerataan, segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksi oleh bangsa yang tidak berarti, bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi, sebagian kecil orang didalam Negara tersebut memiliki kekayaan melimpah, sedangkan sebagian besar penduduk didalam kemiskinan.
3. Kualitas kehidupan, salah satu cara mengukur kesejahteraan penduduk sebuah Negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*Physical Quality Of Life Index*), yang mengukur tiga indikator, yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, rata-rata prosentasi buta dan melek huruf.

4. Kerusakan Lingkungan, sebuah Negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin.
5. Keadilan Sosial Kesenambungan, tolak ukur pembangunan yang berhasil yang semula hanya member tekanan pada tingkat produktivitas ekonomin sebuah Negara, kini menjadi semakin kompleks.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep dan variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoadmojo,2012). Maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam model teoritis yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Penelitian

2.4 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan suatu pembatasan pengertian terhadap suatu masalah supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan arti terhadap suatu konsep. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka definisi konseptual dari masing-masing variabel yang ada didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian dalam keberhasilan mencapai tujuan, dimana efektivitas mengandung pengertian berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Dalam suatu organisasi, pencapaian hasil yang besar diartikan semakin besar pula efektivitas dari tujuan yang diharapkan oleh organisasi. (dalam Rahmawati, 2017:111)

2. Pengertian Efektivitas Kerja

Efektivitas Kerja Merupakan suatu ukuran dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi, tugas, program atau misi dari suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah ditetapkan.

3. Pengertian Desa

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri. seiring dengan perkembangan daerah, pemerintah pusat telah memberikan tugas pembantu kepada pemerintah desa untuk selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat melalui otonom pemerintahan

desa serta peran aktif partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.
(dalam Mardhiah, 2018: 78).

4. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain sesuai peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintahan Daerah.

5. Pengertian BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam pemerintahan desa BPD dapat dianggap sebagai “parlemen-nya” desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesahan peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan pemerintah desa merupakan mitra yang berkerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2018).

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Efektivitas BPD Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Desa di Desa Mura tahun 2019.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yang akan dilakukan Di Desa Mura Kec. Brang Ene. Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019. Alasan mengapa saya mengambil penelitian dilokasi tersebut adalah karena di Desa Mura masih

sangat rendah dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul penulis angkat, oleh karena itu penulis ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti Efektivitas BPD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

3.4 Tehnik Penentuan Informan

Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *Purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. (Sugiyono, 2013:1)

Narasumber dalam penelitian kualitatif narasumber (informan) dalam penelitian yang akan diwawancarai adalah:

- 1) Kepala desa Mura
- 2) Ketua badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) Kasubag Pembangunan BPD
- 4) Tokoh masyarakat

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau efektivitas pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintahan Desa, Daftar nprogram pembangunan desa, catatan peneliti dilapangan, foto-foto pelaksanaan pembangunan desa serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Adapun teknik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi. Observasi, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2018)

b. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono, 2014) mendefinisikan bahwa interview atau wawancara sebagai berikut, *“interview is a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informan yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life Histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018).

3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2014:334).

Dalam analisis data kualitatif, pada dasarnya data dapat dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat (Milles dan Huberman dalam Sugiyono,

2014). Analisis data dalam kualitatif melewati 3 langkah yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode tertentu pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi data, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan yang penting, dan membuat kategorisasi. Reduksi data berlangsung terus menerus secara penelitian, sesudah penelitian dilapangan sampai laporan akhir tersusun. Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dimaksud adalah instrumen penelitian yang dibagikan pada subjek penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap kedua dari analisis data adalah mendisplaykan data, penyajian data adalah sekumpulan informasi menjadi konsep rasional sesuai dengan kenyataan sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Data-data yang telah diambil dan telah direduksi akan disajikan secara deskripsi dimana hasil wawancara diubah bahasanya menjadi kalimat yang lebih baku dan mudah dimengerti serta dikaitkan

dengan teori-teori sesuai dengan hasil wawancara dan observasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dalam bentuk membuat kesimpulan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk pembahasan. Dalam alur ini merupakan kegiatan untuk mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan atau proses penarikan kesimpulan akhir dari data yang telah diambil.

